

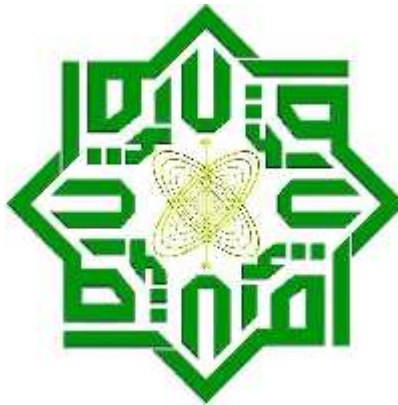
**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Oleh:**

**FRENKY FURWANTO**  
**NIM : 10973006980**



**PROGRAM S.1  
JURUSAN AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMUSOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2013**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1   Latar Belakang.....	1
1.2   Perumusan Masalah.....	6
1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4   Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
2.1   Pengertian Pajak.....	9
2.2   Fungsi Pajak .....	10
2.3   Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.4   Pajak Daerah .....	12
2.5   Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.6   Pajak Parkir .....	19
2.7   Retribusi .....	29
2.8   Retribusi Parkir .....	32
2.9   Pajak Dalam Islam .....	40
2.10 Kerangka Teoritis.....	41
2.11 Model Penelitian .....	41
2.11 Hipotesis .....	42
 <b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
3.1   Tipe penelitian.....	43
3.2   Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	43
3.3   Populasi dan Sampel .....	43
3.4   Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5   Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6   Metode Analisis .....	45
 <b>BAB IV   Gambaran Umum Objek Penelitian</b>	
4.1   Sejarah Objek Penelitian .....	51
4.2   Aktifitas Objek Penelitian .....	53
4.3   Struktur Organisasi.....	57

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1	Deskripsi Data Penelitian.....	64
5.2	Analisis Kuantitatif Variabel Penelitian .....	66

**BAB VI PENUTUP**

6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap Negara memiliki suatu sumber pendapatan untuk kemakmuran Negeranya. Untuk mendapatkan suatu pendapatan salah satunya dikenal dengan Pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi Negara untuk menjalankan apa yang telah di rencanakan sehingga dapat tercapai .

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang maka setiap daerah mendapatkan tantangan dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan Otonomi Daerah karena hal itu setiap daerah mempunyai rencana untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dengan adanya *self assesment system* merupakan suatu sistem dari pemerintah untuk meningkatkan perolehan Pajak.

Kota Pekanbaru mempunyai instansi untuk memungut Pajak parkir dan Retribusi Parkir yang mana Instansi Pemerintah tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang memungut Pajak Parkir dan untuk Retribusi Parkir adalah Dinas Perhubungan.

Dengan pesatnya perkembangan di Kota Pekanbaru sehingga hal ini menyebabkan terdapatnya pusat - pusat keramaian. Seperti hal nya Mall ,Hotel dan lain –lain yang memiliki tempat pembayaran parkir yang memiliki palang pintu parkir otomatis. Menurut penuturan pegawai Dispenda dalam permasalahan Pajak Parkir ini sering terjadinya kurang kesadaran pengusaha –

pengusaha dalam melakukan pembayaran Pajak Parkir . dan juga dalam Retribusi Parkir di tepi jalan umum banyak masyarakat menggunakan trotoar jalan sebagai tempat parkir, padahal trotoar ini peruntukan untuk pejalan kaki meskipun ada rambu –rambu larangan parkir dan dibuatnya portal seperti di sekitar jalan Sudirman, namun tidak membuat sebagian warga patuh begitu saja namun selalu dilanggar(Tribun Pekanbaru-Kamis, 15 November 2012) . Terlebih lagi di waktu malam hari sering adanya petugas parkir yang tidak memakai perlengkapan parkir.

Ketika disinggung mengenai potensi kebocoran dana parkir seperti parkir ilegal, kata Saibul, pihaknya akan memantau dan hal tersebut selalu di evaluasi. Jika ada petugas parkir yang tidak menggunakan saragam dan karcis, itu ilegal dan uangnya tidak masuk dalam PAD Kota Pekanbaru (Harianhaluan,9 November 2012) sehingga dalam hal ini dapat mengakibatkan pemasukan yang tidak sesuai dari pajak parkir tersebut sehingga hal ini dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini cukup menarik dilakukan karena dengan adanya temuan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat beberapa fenomena yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan,
- b. Pemerintah kurang dalam hal penagihan dan pengawasan pajak secara langsung sehingga dapat mengakibatkannya tidak tercapai target dalam Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

c. Kekurangan sumber daya masyarakat dalam memahami perpajakan.

Berikut penulis akan menyajikan data target dan realisasi dari tahun 2010 sampai dengan 2012 tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah dalam Pajak Parkir ,Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah pada tabel 1.1.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi ketidakstabilan atau turun naiknya dalam pencapaian target dan realisasi pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru yang seharusnya memiliki sumber pendapatan yang cukup besar dari sektor Pajak Parkir dan Retribusi parkir ,tetapi masih banyak terdapat beberapa permasalahan seperti halnya diatas dengan adanya tempat parkir ilegal dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajakdengan hal ini bisa jadi mengakibatkan kebocoran dalam Pajak Parkir dan Retribusi Parkir .

Motivasi penulis dalam melakukan peneltian ini dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang pesat dan semakin meningkatnya jumlah pusat keramaian dan meningkatkan kebutuhan lahan parkir seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan baik motor maupun mobil juga untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.







Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“ PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU ”**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Penerimaan pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?
- b. Apakah Penerimaan retribusi parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

**1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**a. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pajak parkir berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Untuk mengetahui apakah retribusi parkir berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

**b. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat menjadi bahan masukan kepada kantor dinas pendapatan kota Pekanbaru dalam memajukan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Parkir
- b. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut ini :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang populasi, sampel populasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, pengukuran variabel, dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai hasil masalah dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di daerah Kota Pekanbaru.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini diberikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan penulis atas analisa permasalahan yang terjadi seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:1) Pajak ialah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut (Anastasia Diana dan Lilies Setiawati ,2009: 2)

Pendapat lain mengatakan bahwa Pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah menurut ( Untung Sukardji,2005:1 )

Waluyo ( 2011:2 ) mengatakan Pajak ialah iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan –peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran –

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang –undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran –pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*,.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter,yaitu mengatur.

## **2.2 Fungsi Pajak**

### **a. Fungsi budgetair**

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan di tunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.

Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

b. Fungsi Regulerend ( Fungsi Mengatur )

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0 %.

## **2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011: 17) dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

*1. Official Asesment System*

- a. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak ang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Asesment System* adalah

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

## *2. Self Asesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang,kepercayaan,tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,membayar,dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## *3. With Holding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.4 Pajak Daerah**

Menurut undang – undang Pasal 1 No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 10 undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 Terdapat beberapa jenis Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah seperti :

**a. Pajak Provinsi terdiri dari :**

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.

**b. Pajak Kabupaten atau kota terdiri atas :**

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **2.5 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau yang di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari



sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - Hasil pajak daerah
  - Hasil retribusi daerah
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasar undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 158 penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu;

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- b. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan. Dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 157 huruf b tentang dana perimbangan :

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Penjelasan tentang Pasal 32 Tahun 2004 Pasal 157 di jelaskan di pasal 159 bahwa

a. Dana Bagi Hasil

1. Dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
  - b. Bea Perolehan Atas Hak T'anah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
  - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
  - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

- b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan
- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang DAU (Dana Alokasi Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk

- a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;
- b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
- c. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
- d. Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan:
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

1. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

2. Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Berdasarkan Pasal 165 Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom. Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.

Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

## **2.5 Pajak Parkir**

### **d. Pengertian Pajak Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. ( Marihot.2005: 407 )

Dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pajak Parkir dijelaskan bahwa Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor .Sedangkan yang dimaksud dengan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garase kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2001

## **b. Objek Pajak Parkir**

Objek pajak parkir menurut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Pasal 3

1. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
2. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

## **c. Subjek pajak dan Wajib Pajak Parkir**

Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Pasal 4

## **d. Dasar Pengenaan, Tarif dan cara perhitungan Pajak Parkir**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu

## **1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

## **2. Tarif Pajak Parkir**

- a. Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir .
- b. Harga karcis jasa Parkir ditetapkan oleh Walikota sudah Termasuk Pajak Parkir atas permohonan Penyelenggara atau pengelola tempat Parkir.

## **e. Cara Perhitungan Pajak Parkir**

Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru No. 70 Tahun 2011 besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak.

Besarnya pajak = jumlah pembayaran / seharusnya dibayar x 30%

Contoh :

- Omset penerimaan sebulan Rp. 150.000.000
- Jumlah potongan / parkir Cuma – Cuma Rp. 5.000.000
- Tarif Pajak Parkir 30%
- Jumlah yang seharusnya diterima =  $\text{Rp.150.000.000} - \text{Rp.5.000.000} = \text{Rp.145.000.000}$
- Pajak terutang =  $\text{Rp. 145.000.000} \times 30\% = \text{Rp.43.500.000}$



**f. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan**

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan untuk Wajib Pajak Parkir harus mengikuti tata cara dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2011 Pasal 15 sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dari pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
2. Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
3. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak , Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas,lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
4. Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD ( Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen Perpajakan Daerah.

**g. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Undang –undang No 2 tahun 2011 pasal 11 Atas usaha penyelenggaraan Parkir Dinas Pendapatan Menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan sistem *Self Assesment* yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara Parkir wajib memberikan tanda bukti Parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir. Pengadaan tanda bukti parkir sebagaimana disediakan oleh Penyelenggara.
2. Tanda Bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Kota berupa Porporasi, kecuali yang menggunakan sistem komputerisasi pajak parkir.
3. Tanda bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud dibuat 3 (tiga) kolom terdiri dari :
  - a. Kolom I : Untuk Pengguna Jasa Parkir.
  - b. Kolom II : Untuk Wajib Pajak.
  - c. Kolom III : Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru

**h. Tata Cara Pembayaran**

Tata cara pembayaran Pajak berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Pasal 17 sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ) , SKPDKB ( Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), dan STPD (Surat Tagihan Pajak

Daerah ). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

2. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

**i. Tata Cara Penagihan**

Tata cara penagihan Pajak dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Pasal 20 yaitu:

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**j. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak**

Berdasarkan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak didalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Pasal 26 yaitu

1. Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana ditetapkan oleh Walikota.

**k. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menetapkan tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Perda No. 2 Tahun 2011 Pasal 27 yaitu :

1. Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
  - a. Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan wajib pajak;
2. Permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana harus di sampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberi alasan yang jelas.

3. Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana diterima, sudah harus memberikan keputusan.
4. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka permohonan dianggap dikabulkan.

#### **1. Pemeriksaan**

Pemeriksaan Pajak Parkir dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Pasal 28 yaitu :

1. Pajak yang telah dibayar, setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh tim pemeriksa yang hasilnya dibuat dalam berita acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan atas SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.
2. Tim Pemeriksa Pajak dibentuk berdasarkan keputusan Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim pemeriksa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran Pajak.
4. Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen dan memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan/ tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penungguan pada objek pajak yang bersangkutan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPDKB dan SKPDKBT
  - b. Untuk mendapatkan data yang objektif dilapangan.
6. Hasil Penungguan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan Pajak.
7. Lamanya jangka waktu penggunaan ditentukan oleh Walikota.

**m. Keberatan Dan Banding**

Keberatan dan Banding dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 pasal 29 adalah :

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas :
  - a. SKPDKB ( Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar )
  - b. SKPDKBT( Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)
  - c. SKPDLB ( Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar )
  - d. SKPDN ( Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil )
2. Permohonan keberatan sebagaimana harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila wajib pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

3. Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana diterima, sudah harus memberikan keputusan.
4. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
5. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**n. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 yaitu :

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak
  - b. Masa Pajak
  - c. Besarnya kelebihan membayar Pajak
  - d. Alasan yang jelas.
2. Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana sudah harus memberikan keputusan.

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dilampaui, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

## **2.6 Retribusi**

### **a. Retribusi**

Menurut Marihot (2005 : 6 ) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Retribusi menurut undang- undang No 28 Tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan



Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan menurut (Mardiasmo, 2009:14 )

Pendapat lain mengatakan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan menurut (Agus Setiawan dan Basri Musri, 2006:349)

#### **b. Objek Retribusi**

Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Objek Retribusi terdiri dari 3 yaitu :

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu

Untuk lebih jelasnya dalam pembagian objek retribusi akan di jelaskan oleh tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis Retribusi berdasarkan objek

No	Objek Retribusi	Jenis Retribusi
1	Jasa Umum	a.Retribusi Pelayanan Kesehatan b.Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan c.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Retribusi Pelayanan Pasar g.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta j.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus k.Retribusi Pengolahan Limbah Cair l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang m.Retribusi Pelayanan Pendidikan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Jasa Usaha	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan c. Retribusi Tempat Pelelangan d. Retribusi Terminal e. Retribusi Tempat Khusus Parkir f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa g. Retribusi Rumah Potong Hewan h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga j. Retribusi Penyeberangan di Air k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3	Perizinan Tertentu	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Retribusi Izin Gangguan d. Retribusi Izin Trayek e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dapat dilihat bahwa objek retribusi terdiri atas 3 yaitu Retribusi Jasa Umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Untuk lebih jelasnya objek dari

retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Terakhir untuk Objek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **2.7 Retribusi Parkir**

### **a. Pengertian Retribusi Parkir**

Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan( Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011)

Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir ( Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009)

**b. Objek Retribusi Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 4, Objek Retribusi Parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah

**c. Subjek Retribusi Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 5 ,Subjek Retribusi Parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.

**d. Cara Mengukur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir**

Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 6 adalah

1. Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir diukur berdasarkan kawasan dan jenis kendaraan.
2. Kawasan sebagaimana dimaksud dari :
  - a. Kawasan khusus;
  - b. Di luar kawasan khusus.

**e. Prinsip Penetapan Kawasan Dan Sturktur Besaran Tarif**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 8 penetapan kawasan dan struktur besaran tarif yaitu

1. Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktifitas ekonomi masyarakat dan/atau tingkat pelayanan jalan;
2. Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalulintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**f. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 9 dan pasal 10 adalah

1. Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut :
2. Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir .
3. Tarif retribusi parkir insidentil ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir .
4. Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi dalam wilayah Kota Pekanbaru dapat membayar retribusi parkir berlangganan pada saat uji kendaraan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan sesuai dengan masa berlaku uji secara periodik, dan ditandai stiker bebas parkir.

Untuk lebih jelas tarif Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan dapat dilihat dari tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rician Tarif Parkir Kendaraan Tepi Jalan Umum

NO	Uraian	Tarif Parkir Jalan umum	Tarif Parkir Jalan Khusus	Tarif Parkir insidentil	Tarif Parkir Uji coba
1	-Sepeda Motor	- Rp 1.000	- Rp 1.500	- Rp 1.000	
2	- Mobil Penumpang	- Rp 2.000	- Rp 4.000	- Rp 2.000	-Rp 15.000
3	- Mobil Bus Kecil	- Rp 2.000	- Rp 4.000	- Rp 2.000	-Rp 15.000
4	- Mobil Bus Sedang	- Rp 3.000	- Rp 5.000	- Rp 3.000	-Rp 20.000
5	- Mobil Bus Besar	- Rp 4.000	- Rp 7.000	- Rp 4.000	-Rp 30.000
6	- Mobil Barang Pickup	- Rp 2.000	- Rp 3.000	- Rp 2.000	-Rp 15.000
7	- Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua )	- Rp 3.000	- Rp 5.000	- Rp 6.000	-Rp 30.000
8	- Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga )	- Rp 3.000	- Rp 7.000	- Rp 6.000	-Rp 30.000
9	- Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga Atau Lebih )	- Rp 3.000	- Rp 3.000	- Rp 6.000	-Rp 30.000
10	- Kereta Tempelan	- Rp 3.000		- Rp 6.000	-Rp 30.000
11	- Kereta Gandengan	- Rp 3.000		- Rp 6.000	-Rp 30.000

Sumber :Dishub Kota Pekanbaru

#### **g. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Menurut Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 37 Dan Pasal 38 yaitu :

1. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari,  
1(satu) malam, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun.
2. Masa Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan Surat  
Ketetapan Retribusi Terminal atau dokumen lain yang  
dipersamakan.

#### **h. Tata Cara Pemungutan**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 39 Pemungutan

retribusi tidak dapat diborongkan yaitu :

1. Retribusi dipungut menggunakan atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih

**i. Penagihan**

Untuk penagihan Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2009 Pasal 41 :

1. Surat ketetapan retribusi dan penagihannya merupakan dasar penagihan retribusi.
2. Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang pembayaran, maka atas jumlah retribusi yang tidak dapat dibayarkan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh perseratus).
3. Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi tambahan dan biaya penagihan kadaluarsa setelah lampau 3 (tiga) tahun dihitung sejak retribusi terhutang.

**j. Keberatan**

Untuk keberatan dalam Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 42 yaitu :

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau

pejabat yang ditunjuk atas penetapan retribusi.

2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan tertentu.
3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **k. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

Untuk pengurangan ,keringanan dan pembebasan Retribusi Menurut

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 44:

1. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.



2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota dalam suatu Keputusan Walikota.

#### **1. Penyidikan**

Untuk Penyidikan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

Pasal 46 :

1. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh alat penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana yang di maksud:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

- d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan / atau tempat kejadian peristiwa (TKP)
- f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dewi Sufaini dan Sri Eka Nurhayati Pamungkas, maka peneliti akan menyajikan hasil penelitian sebelumnya dalam tabel 2.3 untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 2.3 Hasil penelitian sebelumnya

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Jurnal Dewi Sufaini (jurnal ,2010)	Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut yaitumemeriksa kembaliAntara target pajak parkir dan potensi yang ada, menghitung kapasitas penerimaan Melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis Sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi, memperluas Penerimaan pajak dan membuat peraturan daerah dengan menetapkan sanksi dalam Meningkatkan pengawasan. Dengan upaya tersebut terbukti dapat meningkatkan Penerimaan pajak parkir.
Jurnal Sri Eka Nurhayati Pamungkas (jurnal ,2012)	Analisis Pengaruh Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan	Pajak parkir, retribusi parkir dan penerimaan dinas perhubungan kota tasikmalaya. Berdasarkan data-data diatas bahwa pajak parkir, retribusi parkir mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan penerimaan dinas perhubungan dan hal tersebut pemerintah harus lebih mengupayakan dan memaksimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada wajib pajak yang belum melaksanakan untuk membayar kewajiban pajaknya serta pemungutan pajak pun harus tepat waktu.

## 2.8 Pajak Dalam Islam

Pajak dalam islam dijelaskan dalam surat At –taubah ayat 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [At Taubah: 41].

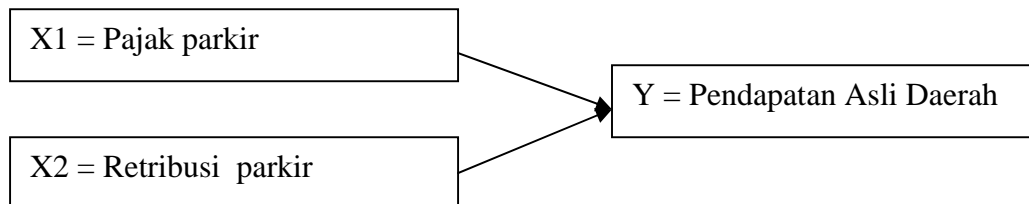
## 2.9 KERANGKA TEORITIS

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel utama dalam penelitian ini, dua variabel yang mempengaruhi variabel dependen adalah variabel independen yaitu Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

- a. Pajak Parkir dan Retribusi Parkir merupakan sumber pendapatan asli daerah bagi kota Pekanbaru. dalam hal ini dapat dilihat seberapa besar penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan berapa besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah itu sendiri.

## 2.10 MODEL PENELITIAN

Untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dan independen maka Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## **2.11 HIPOTESIS**

Pajak Parkir dan Retribusi Parkir merupakan suatu sumber pendapatan bagi daerah Kota Pekanbaru sehingga Pajak parkir dan Retribusi parkir ini memberikan pendapatan yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Oleh karena itu hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah :

Ha1 : Pajak parkir memberikan penerimaan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Ha2 : Retribusi parkir memberikan penerimaan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ha3 : Pajak Parkir dan Retribusi Parkir memberikan penerimaan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Menurut metodenya penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif , Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009:14) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan berdasarkan kedudukan variable dan eksplanasi dapat dikelompokkan dalam penelitian kuantitatif.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru yaitu dikantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tentang pajak parkir yang terdapat di Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mulai dari tanggal 26 Desember 2012 sampai selesai.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2009

:74). Populasi penelitian ini Seluruh Dipenda(Dinas Pendapatan Daerah) dan Dishub (Dinas Perhubungan) yang berada di Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Dispenda dan Dishub yang ada di Kota Pekanbaru

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder .Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber –sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Ulber Silalahi,2009:253 ) data ini diperoleh dari data historis dari Dispenda dan Dishub Kota Pekanbaru periode 2007-2012. Data merupakan data time series,data time series atau deret waktu adalah serangkaian nilai pengamatan (observasi) yang diambil selama kurun waktu tertentu, pada umumnya dalam interval –interval yang sama panjang. (Spiegel dan Stephens,2009 :352)

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini metode dokumenter , artinya pengumpulan data melalui informasi tertulis mengenai suatu objek,subjek atau kejadian berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen Dispenda dan Dishub Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Kantor Dispenda dan Dishub Kota Pekanbaru

### **3.6 Metode Analisis**

#### **1. Metode Analisis Kuantitatif.**

Metode analisis ini merupakan penganalisaan dengan menggunakan peralatan analisis. Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel tetapnya (dependen).

#### **2. Uji Asumsi Klasik**

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan Multiple Linear Regression sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

#### **3. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal atau mendekati normal dengan melihat normal probability plot. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2007:110). Metode pengujian normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Kriteria probabilitas dari uji



normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut Ghozali (2007:112):

1. Bila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov bernilai di bawah 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.
2. Bila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov bernilai di atas 0.05 maka data berdistribusi normal.

#### 4. Uji Multikolonearitas

Pengujian multikolonearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel X tidak saling berkorelasi linear. Sesungguhnya multikolonearitas itu tetap ada pada setiap variabel independen, hanya saja harus dipastikan apakah multikolonearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation faktor* (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Nilai *coffof f* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah  $\text{tolerance} < 0,10$  atau sama dengan nilai  $\text{VIF} > 10$ .

#### 5. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari autokorelasi.

Menurut Ghozali (2005:91) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson dimana: jika angka  $D-W > d_l < (k - d_u)$  berarti tidak terdapat gejala autokorelasi.

#### 6. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian *variance* dari residualnya tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas.

#### 7. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Berikut ini adalah persamaan Regresi Linier Berganda, dimana variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) variabel independennya adalah Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2)

Dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	: Variabel Terkait (Pendapatan Asli Daerah)
X1,X2	: Variabel Bebas I,II(Pajak parkir dan Retribusi Parkir)
a	: Konstanta
b1,b2	: Koefisien regresi
e	: Galat (error)

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05, apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F dari tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini adalah 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 8. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya.(sugiyono,2009). Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum PAD adalah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

2. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1).
3. Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan( peraturan daerah nomor 2 tahun 2011)

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Seksi Tata Usaha
- c) Seksi Pajak dan Retribusi
- d) Seksi IPEDA
- e) Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pajak
- d) Seksi Retribusi
- e) Seksi IPEDA
- f) Seksi Pendapatan Lain-lain
- g) Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d) Seksi Penetapan
- e) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f) Seksi Penagihan
- g) Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Wakil Kepala Dinas
- c) Bagian Tata Usaha
- d) Sub Dinas Program
- e) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f) Sub Dinas Penagihan
- g) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i) Kelompok Fungsional

#### **4.2 Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

- a) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota



Pekanbaru mempunyai tugas Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Pendapatan Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis

Sebagai mana perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran tugas
- b. Membina, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan kearah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas
- c. Merumuskan kebijakan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemungutan ,pengawasan / pemantauan, pengembangan dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan Daerah
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek Pajak/Retribusi Daerah yang terhutang serta besarnya angsuran wajib pajak

2. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi objek dan subjek pajak/retribusi daerah , perhitungan realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengarsipan surat –surat perpajakan daerah
3. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pemeriksaan lokasi penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah
4. Merumuskan dan melaksanakan penagihan pajak/retribusi daerah, pembinaan pembukuan dan verifikasi, serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi daerah
5. Merumuskan dan melaksanakan penatausahaan atas objek dan subjek pajak, penerimaan retribusi, penerimaan BUMD, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan pendapatan lain –lain dan surat – surat berharga serta legalisasinya.

## 2. Pemberian Pelayanan Umum

Sebagai pemberian pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berperan dalam:

- a. Mengkordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang diterapkan.

- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan , pendistribusian dan penagihan tunggakan pendapatan daerah
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak /retribusi daerah
- d. Merumuskan dan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan pembayaran pajak/retribusi daerah
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyampaian dan penerimaan surat pemberitahuan objek pajak ( SPOP) , surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak

### 3. Pengelolaan Urusan Sekretariat

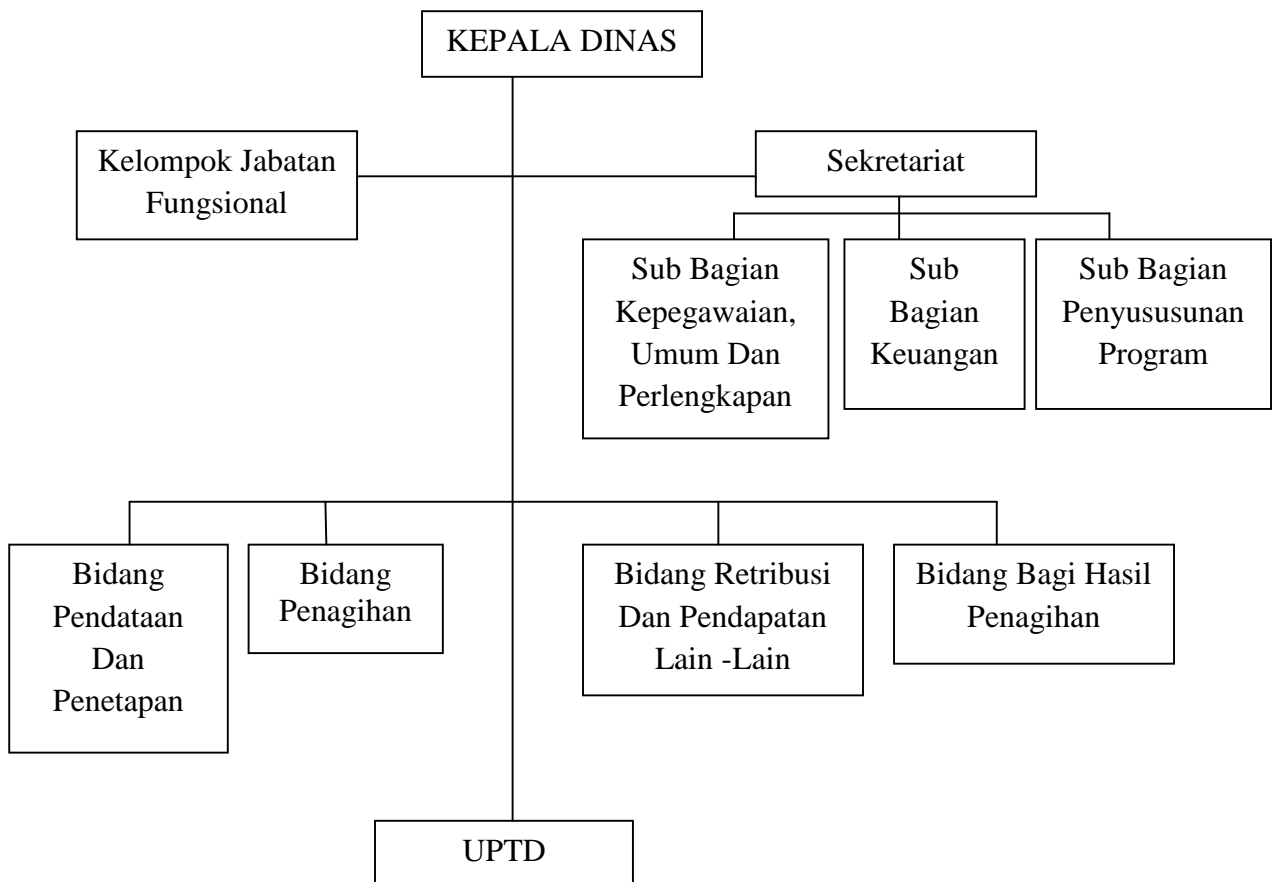
Sebagai pengelolaan urusan secretariat dinas pendapatan daerah berperan dalam :

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum , keuangan , kepegawaian dan perlengkapan
- b. Membina pengelolaan urusan umum , keuangan , kepegawaian dan perlengkapan
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketata - usahaan , rumah tangga, perlengkapan dan keuangan serta administrasi kepegawaian
- d. Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelola perlengkapan, protocol , kearsipan , keuangan dan kepegawaian

#### 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

##### 1. Struktur organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut :



Sumber: Dispenda Kota Pekanbaru

Bagian susunan struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:

- 1.Sub Bagian Kepegawaian,Umum Dan Perlengkapan

2.Sub Bagian Keuangan

3.Sub Bagian Penyusunan Program

c. Bidang pendataan dan penetapan terdiri atas:

1.Seksi Pendataan Dan Pendaftaran

2.Seksi Penetapan

3.Seksi Pemeriksaan

d. Bidang penagihan terdiri dari :

1.Seksi Pembukuan, Verifikasi,Evaluasi Dan Pelaporan

2.Seksi Penagihan, Pertimbangan Dan Keberatan

3.Seksi Pengembangan Pendapatan, Restitusi Dan Perhitungan

e. Bidang retribusi dan pendapatan lain –lain terdiri atas :

1.Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi

2.Seksi Penerimaan BUMD Dan Pendapatan Lain – Lain

3.Seksi Legalisasi Dan Pembukuan Surat-Surat Berharga

f. Bidang bagi hasil pendapatan terdiri dari:

1.Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

2.Seksi Bagi Hasil Pajak

3.Seksi Peraturan Dan Perundang-Udangan

g. Kelompok jabatan fungsional : Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidang keahlian

h. UPTD mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Wilayah

Kerja UPTD Guna Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Dengan Pendekatan Koordinasi, Efisiensi ,Efektifitas Dan Produktifitas Sumber Daya

2. Menyampaikan Dan Mendistribusikan SPPT PBB Serta Melaksanakan Program K3

3. Melaksanakan Pengendalian Pengawasan Evaluasi

## 2. Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Dispenda

Sebagaimana dalam halnya perangkat daerah pasti memiliki tugas dan fungsinya yang ditunjang oleh pegawai pada dinas pendapatan daerah kota pekanbaru berjumlah 65 orang terdiri dari 32 laki-laki dan 33 orang perempuan. Klafikasi berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Pegawai Dispenda Berdasarkan Golongan,Jabatan Dan Pendidikan.

NO	Uraian	Klasifikasi	Jumlah
1	1. Berdasarkan Golongan	1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan II	- 6 orang - 45 orang - 14 orang
2	1. Berdasarkan Jabatan	1. Eselon II.a 2. EselonIII.a 3. EselonIII.b 4. EselonIV.a 5. EselonIV.b	- 1 orang - 1 orang - 4 orang - 19 orang - 4 orang
3	1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	1. S2 2. S1 3. D3 4. SMA/UMUM 5. SLTP	- 7orang - 32 orang - 8orang - 15 orang - 3orang

Sumber :Dispenda Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan golongannya pegawai dispenda terdiri dari 3 golongan yaitu golongan IV beranggotakan 6 orang, golongan III beranggotakan 45 orang serta golongan beranggotakan 14. Dilihat dari jabatannya pegawai dispenda dapat dibagi atas 5 bagian yaitu eselon II.a yang terdiri dari 1 orang, eselon III.a 1 orang, eselon III.b 4 orang, eselon IV.a 19 orang dan yang terakhir eselon IV.b yang terdiri dari 4 orang. Selanjutnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dapat dibagi berdasarkan S2 7 orang, S1 32 orang, D3 8 orang, SMA/Umum 15 orang dan SLTP 3 orang.

### **3 . Aspek Strategi Organisasi**

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan ( aktivitas ) dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi, strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Kegiatan, program dan arah kebijakan untuk tahun anggaran 2011 diarahkan untuk meningkatkan penerimaan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

#### **4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru**

##### **a. Visi**

Adapun visi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yaitu “  
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan”.

##### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi diatas maka ditetapkanlah misi Dinas  
Pendapatan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
2. Mengkoordinir Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Dan  
Melakukan Pembinaan Teknis Pemungutan Dengan  
Memanfaatkan Sumber Potensi Yang Tersedia
3. Menerapkan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pendapatan  
Daerah
4. Mengoptimalkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap  
Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

#### **5 . Tujuan dan Sasaran**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan  
misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan  
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5  
tahun. Tujuan juga akan menggambarkan arah strategi organisasi  
dan perbaikan –perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih



mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Tujuan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru adalah

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan
3. Meningkatkan Tertib Administrasi
4. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun kedepan. Focus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun sasaran dari Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan
3. Terwujudnya Tertib Administrasi Pendapatan Daerah

4. Terwujudnya Kesadaran Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Deskripsi Data Penelitian

Kota pekanbaru memiliki anggaran pendapatan belanja daerah(APBD) yang cukup besar dapat dilihat dari beberapa jenis PAD kota pekanbaru yang di jelaskan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan Kota Pekanbaru

NO	Jenis PAD	TAHUN					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Daerah	69.026.867.700	79.871.290.000	74.719.000.000	100.776.591.255	129.236.371.255	162.072.582.090
2	Retribusi Daerah	54.776.110.623	56.520.641.125	60.127.000.000	75.049.677.030	68.410.332.754	61.948.055.769
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.837.826.450	2.814.802.732	2.238.000.000	2.626.101.441	3.860.912.633	3.488.75.439.956
4	Lain- Lain PAD Yang Sah	23.207.605.227	14.859.428.850	44.662.000.000	17.733.202.310	24.789.692.900	23.842.808.001

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI

(<http://www.djpk.depkeu.go.id>)

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Realisasi penerimaan Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan PAD Kota Pekanbaru selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Tahun	Pajak Parkir	Retribusi Parkir	Pendapatan Asli Daerah
2007	2.333.402.877	2.557.625.440	975.793.388.214
2008	3.013.082.386	2.606.423.100	1.108.542.215.122
2009	2.935.975.475	3.546.100.200	1.039.522.974.647
2010	3.911.436.114	5.036.522.500	1.187.806.416.910
2011	4.472.944.458	4.983.487.000	1.544.086.802.709
2012	7.196.883.291	5.152.778.000	1.748.245.500.779

Sumber: Dispenda dan Dishub Kota Pekanbaru,2012

Dari tabel diatas dapat diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru diukur berdasarkan variabel Pajak Parkir dan Retribusi Parkir dari tahun 2007 sampai dengan 2012. Dilihat dari kontribusi pajak parkir tahun 2007 terhadap PAD sebesar 0,23%, tahun 2008 0,27%, tahun 2009 0,28%, tahun 2010 0,33%, tahun 2011 0,29% dan tahun 2012 sebesar 0,41% .untuk retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2007 sebesar 0,26%, tahun 2008 0,23%, tahun 2009 0,34%, tahun 2010 0,42%, tahun 2011 0,32% dan tahun 2012 sebesar 0,29%.Pada sektor pendapatan Daerah Pajak parkir terendah tahun 2007 senilai 2.333.402.877 dan yang tertinggi pada tahun 2012 yaitu sejumlah 7.196.883.291 sedangkan pada bagian Retribusi Parkir yang terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sejumlah 2.557.625.440 dan yang tertinggi pada tahun

2012 yaitu sejumlah 5.152.778.000 dan pada bagian Pendapatan Asli Daerah yang terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 975.793.388.214 dan yang terbesar pada tahun 2012 sebesar 1.748.245.500.779.

## 5.2 Analisis Kuantitatif Variabel Penelitian

### 1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov smirnov*. Kriteria uji adalah jika setiap variable individu menghasilkan nilai signifikan (Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan normal dan sebaliknya. Seperti tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 Uji Normalitas

		PAJAK PARKIR	RETRIBUSI PARKIR	PAD
N		6	6	6
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	3.9773E9	3.9805E9	1.2673E12
	Std. Deviation	1.75112E9	1.23262E9	3.08643E11
Most Extreme Differences	Absolute	.222	.292	.268
	Positive	.222	.201	.268
	Negative	-.174	-.292	-.172
Kolmogorov-Smirnov Z		.544	.715	.657
Asymp. Sig. (2-tailed)		.929	.685	.781

Sumber : Data olahan penelitian ,2013

Berdasarkan tabel 1.7 diatas dapat kita lihat untuk pajak parkir memiliki nilai (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar  $0.929 > 0.05$  maka nilai residual pajak parkir berdistribusi normal, sedangkan Retribusi Parkir nilai (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar  $0.685 > 0.05$  berdistribusi normal dan untuk nilai PAD memiliki (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar  $0.781 > 0.05$  maka data ini berdistribusi normal . dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah berdistribusi dengan normal.selanjut dapat dilakukan uji asumsi klasik.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 dapat dilihat secara umum yang ditunjukkan oleh nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF) dengan batasan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10.

Tabel 5.4 Hasil uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pajak Parkir (x1)	.406	2.463	Tidak terdapat Multikolinearitas
Retribusi Parkir(x2)	.406	2.463	

Sumber: Data olahan peneltian ,2013

Tabel diatas menunjukan nilai *variance inflation factor* (VIF) di angka 2,463 dan tolerance di angka 0,406 maka dapat di simpulkan tidak terdapat multikolinearitas

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya gangguan Heteroskedastisitas , peneliti menggunakan uji Glejser dengan criteria nilai signifikan antara variable independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5.5 Hasil uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7.923E10	6.261E10		-1.265	.295
Pajak Parkir	-27.755	16.637	-.794	-1.668	.194
Retribusi Parkir	64.405	23.635	1.296	2.725	.072

Sumber data olahan penelitian , 2013

Dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikan Pajak Parkir sebesar  $0.194 > 0.05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk Retribusi Parkir nilai signifikan sebesar  $0.072 > 0.05$  maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

#### 4. Uji auto korelasi

Autokorelasi terjadi bila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada abservasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi adanya autokorelasi ini adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Ketentuan uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Jika DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif
- b. Jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi
- c. Jika DW diatas +2, berarti autokorelasi negatif

Tabel 5.6 Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson
a. Predictors: (Constant), Retribusi Parkir, Pajak Parkir b. Dependent Variable: PAD	2.841

Sumber data olahan penelitian ,2013

Pada tabel diatas terlihat bahwa angka Durbin Watson diatas sebesar 2.841 yang berarti tidak terjadi autokorelasi, hal tersebut karena angka Durbin Watson di atas berada +2,yaitu sebesar 2.841 dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini autokorelasi negatif.



## 2 . Pengujian hipotesis metode Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua cara yaitu pengujian secara simultan dari masing-masing variabel bebas dan pengujian hipotesis secara individual (parsial)

### a. Pengujian secara parsial (Uji T)

Untuk membuktikan hipotesis secara parsial digunakan uji t yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh masing –masing variabel bebas secara parsial atau sendiri – sendiri dalam menjelaskan variabel terikat sehingga diketahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat yaitu PAD Kota Pekanbaru dari dua variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5.7 Uji Secara Parsial ( Uji t)

Variabel	t-hitung	t- tabel	signifikansi
(constant)	2.928	2.353	0.061
Pajak Parkir	3.026	2.353	0.056
Retribusi Parkir	0.464	2.353	0.674

Sumbe Data olahan penelitian ,2013

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing –masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual serta untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat dengan mengukur derajat hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat yang dijelaskan melalui hipotesis berikut

- a. Berdasarkan nilai  $t$  Pajak Parkir ( $X_1$ ) senilai 3,026 dalam hal ini  $t$  – hitung lebih besar dari  $t$ -tabel 2.353. hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir ( $X_1$ ) mempengaruhi PAD di Kota Pekanbaru
- b. Berdasarkan nilai  $t$  Retribusi Parkir ( $X_2$ ) senilai 0,464 dalam hal ini  $t$ -hitung lebih kecil dari  $t$ -tabel 2.353. hasil menunjukkan bahwa Retribusi Parkir ( $X_2$ ) tidak mempengaruhi PAD di Kota Pekanbaru

Dari hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi PAD di Kota Pekanbaru adalah variabel Pajak Parkir.

b . Uji Secara Simultan (Uji F)

Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikan konstanta secara simultan yaitu diduga Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara bersama –sama berpengaruh terhadap PAD Kota Pekanbaru digunakan uji Anova atau F test, dengan ketentuan  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel maka variabel Pajak Parkir dan Retribusi Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, demikian juga sebaliknya. Untuk lebih jelas dapat dilihat uji F Anova berikut ini

Tabel 5.8 Hasil Uji F

F	Sig
14.207	0.30

Sumber : data olahan penelitian,2013

Dari tabel dapat dilihat F-hitung sebesar 14.207 dengan tingkat signifikan sebesar 0.30, sedangkan nilai F-tabel 14.207 pada tingkat signifikansi 5% yang berarti tingkat kepercayaan peneliti sebesar 95%. Jadi dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} = 14.207 > F_{tabel} 9.55$ . artinya bahwa variabel Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara signifikan dapat mempengaruhi PAD (Y).

#### c. Koefisien Deteminasi

Pengujian hipotesis secara total digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama –sama terhadap variabel terikat. Seperti pada  $H_a$  : diduga Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) mempengaruhi secara simultan terhadap PAD (Y) di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui secara simultan adalah dengan melihat hasil perhitungan khususnya nilai R square pada model summary berikut

Tabel 5.9 Uji R

R square	Adjusted R Square
.905	.841

Sumber : Data olahan penelitian,2013

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui variabel independen secara bersama –sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi( $R^2$ ) =1 artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Jika Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) = 0 artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruh variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 90,5% berarti hubungan antara variabel dependen terhadap independen sangat kuat atau tinggi karena berada antara 0 dan 1.

Sedangkan angka *adjusted R square* ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,841 menunjukkan bahwa sebesar 0,841 PAD di Kota Pekanbaru bisa dijelaskan dengan variabel Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir.

Pengunaan teknik data regresi berganda ( *multiple regression analysis*) pada penelitian ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Pekanbaru. Berdasarkan tabel 1.13 maka di peroleh model persamaan analisis sebagai berikut :

Tabel 5.10 Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.439E11	1.858E11		2.928	.061
Pajak Parkir	149.350	49.356	.847	3.026	.056
Retribusi Parkir	32.517	70.117	.130	.464	.674

Sumber : Olahan data penelitian,2013

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y \text{ (PAD)} = 5.439E11 + 149.350X_1 + 32.517X_2$$

Dari regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien jalur variabel Pajak Parkir ( $X_1$ ) =149.350 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD Kota Pekanbaru. Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel Pajak Parkir maka PAD Kota Pekanbaru akan naik sebesar 149.350 satuan dengan anggapan bahwa variabel lain konstan.
2. Koefisien jalur variabel Retribusi Parkir ( $X_2$ ) =32.517 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD Kota Pekanbaru. Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel Pajak Parkir maka PAD

Kota Pekanbaru akan naik sebesar 32.517 satuan dengan anggapan bahwa variabel lain konstan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas mengenai pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2007 sampai dengan 2012, yang peneliti lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa hasil penelitian tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru ,maka dalam hal ini Dispenda dan Dishub harus lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil statistik nilai t- Pajak Parkir(X1) sebesar 3.026 lebih besar dari t-tabel 2.353 hal ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir (X1) mempengaruhi PAD Kota Pekanbaru
2. Berdasarkan hasil statistik nilai t -Retribusi Parkir (X2) sebesar 0.464 lebih kecil dari t-tabel 2.353 hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa Retribusi Parkir (X2) tidak mempengaruhi PAD Kota Pekanbaru.

3. Berdasarkan hasil dari statistik nilai  $f$ -hitung sebesar 14.207 lebih besar dari  $f$ -tabel 9.22 bahwa Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara signifikan mempengaruhi PAD
4. Variabel Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara bersama –sama (simultan) mempengaruhi Pendapatan Kota Pekanbaru dengan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) 90.5% berarti hubungan antar variabel dependen terhadap indepen sangat kuat atau tinggi karena berada dari nol atau satu.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran :

1. Menyarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama di bidang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Kota Pekanbaru.
2. Disarankan kepada masyarakat terutama yang wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan ikut serta dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di Kota Pekanbaru
3. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menjadi penelitian ini sebagai referensi di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Jakarta : PT Sari Agung
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilies. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung. CV Alfabeta
- Sufaini, Dewi. 2010. "Jurnal Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung". *Skripsi*.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Andi Publisher
- Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2008, *Perpajakan Indonesia (edisi revisi)*, Yogyakarta. Andi CV
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi Muljono
- Marihot. 2005. *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*. Jakarta: Pantialo Lestari Raya Grafindo
- Spiegel, Murray R. dan Stephens, Larry J. 2009. *Statistik (edisi 3)*. Jakarta : Erlangga
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 70 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah No 3 tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir
- Peraturan Daerah No 3 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpajakan.

Peraturan Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Undang-Undang No 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 70 tahun, 2011 Tentang Pajak Parkir.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Haryati, Sri Eka. 2011. “jurnal analisis pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir terhadap penerimaan dinas perhubungan (studi kasus di dinas perhubungan di tasikmalaya)”. *Jurnal*.

Pamungkas, Sri Eka Nurhayati. 2012. “Jurnal Analisis Pengaruh Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan”. *Jurnal*.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan nilai (edisi revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo.

Waluyo, 2002, *Pajak Indonesia edisi I*, Jakarta : Salemba Empat

Waluyo, 2011, *Pajak Indonesia* . Jakarta: Salemba Empat.

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), Di akses pada tanggal 23 April 2013

[www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com), Di akses pada tanggal 26 Desember 2012.

[Www.pajak.go.id](http://Www.pajak.go.id), Di akses pada tanggal 26 Desember 2012.

[Www.pekanbaru.tribunnews.com](http://Www.pekanbaru.tribunnews.com), Di akses pada tanggal 26 Desember 2012.